

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literature

Pada bab kajian pustaka ini membahas mengenai hasil penelitian terdahulu dan konsep konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian ini :

table 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Teori	Metode	Hasil
1.	The politics of environmental policy: haze pollution, ASEAN, and the way forward (2024)	Putra Bama Andika	Politik Lingkungan, Tata Kelola Regional (ASEAN)	Studi Eksplanatoris Empiris	Menganalisis ketidakmampuan ASEAN dalam menengahi 'permainan saling menyalahkan' ( <i>blame game</i> ), yang membuka ruang bagi

					advokasi aktor non-negara.
2.	Environmental agreement under the non-interference principle : the case of <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i> (2022)	Fikri Muhammad	Institusionalisme (Konsep Legalisasi), Prinsip Non-Interference	Studi Kasus, Analisis Kebijakan	Prinsip non-interference (ASEAN Way) secara fundamental menghambat AATHP menjadi perjanjian yang kredibel, karena bertentangan dengan kewajiban keras dan penyelesaian sengketa

					pihak ketiga.
3.	Strategi Greenpeace Indonesia Dalam Advokasi Permasalahan Polusi Kabut Asap Di Sumatera Selatan (2025)	Andrian Sani	<i>Transnational Advocacy Networks</i> (TANs), Gerakan Sosial	Kualitatif Deskriptif	Menganalisis strategi advokasi yang digunakan Greenpeace (seperti <i>information and leverage politics</i> ) untuk menekan korporasi dan pemerintah terkait kabut asap di Sumatera Selatan.
4.	Implications of <i>Citizen lawsuits</i>	F. X. A. Setiawan, Absori	<i>Citizen lawsuit</i> (Gugatan Warga	Studi Kasus Yuridis	Menganalisis keberhasilan <i>citizen</i>

	for Forest and Land Fires in Central Kalimantan Province from the Perspective of Environmental (2023)	Absori, Kelik Wardiono, Arief Budiono, Achmad i Achmad i, W. Yuspin	Negara), Keadilan Lingkungan		<i>lawsuit</i> dalam membuktikan kelalaian pemerintah, yang relevan dengan strategi advokasi litigasi WALHI.
5.	Corporate Accountability in Environmental Crimes: Lessons from Indonesia's Forest Fires	Sujono & Istianingsih	Akuntabilitas Korporasi (Corporate Accountability)	Studi Kasus (Analisis Putusan Pengadilan)	Mengungkapkan kesenjangan penegakan hukum dan hukuman yang tidak memadai bagi korporasi pembakar

	and Beyond (2024)				lahan, memperkuat argumen tentang perlunya tekanan eksternal.
6.	Transboundary Haze in Indonesian and Malaysian News Media: Corpus-Assisted Ecological Linguistics (2025)	Suhanda no, Arina Isti'anah, Diana Sri Suryani, Roslina Abdul Aziz, Nadhratunnaim Abas, Kamisah Ariffin, Badli Esham Ahmad	Analisis Framing (Pembinaan Media), Ekologi linguistik	Analisis Korpus (Linguistik)	Menemukan perbedaan framing media: Indonesia membingkai sebagai 'bencana', sementara Malaysia sebagai 'isu kesehatan /polusi', yang memengaruhi <i>informati</i>

					<i>on politics.</i>
7.	The Role of Indonesia in Managing Trans-Boundary Haze Pollution as Environmental Security Issue in Southeast Asia (2021)	Lili Yulyadi Arnakim & Nadhira Shabrina	Keamanan Lingkungan (Environmental Security)	Analisis Kualitatif (Data Primer & Sekunder)	Menemukan bahwa Indonesia bersikap 'pasif dan acuh tak acuh' (passive and indifferent) dalam menangani kabut asap, yang menunjukkan kegagalan <i>interdependence sovereignty</i> .
8.	Keterlibatan WALHI dalam	Herry Wahyudi, MFajar	Politik Lingkungan (Green	Kualitatif Deskriptif	Menganalisis peran dan strategi

	Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau (2021)	Anugerah, Muhammad Arif	Politics), Gerakan Sosial		keterlibatan WALHI dalam arena politik lingkungan di Riau, khususnya dalam merespons kasus kabut asap melalui advokasi dan gugatan.
9.	Emergent geographies of chronic air pollution governance in Southeast	Helena Varkkey	Tata Kelola Transnasional, <i>Transboundary publics</i> (Publik Lintas Batas)	Kualitatif (Analisis Wacana Publik)	Menganalisis bagaimana publik di Singapura (sebagai <i>transboundary publics</i> ) membent

	<p>st Asia: <i>Transboundary publics</i> in Singapore (2022)</p>				<p>uk wacana dan tata kelola polusi, menciptakan tekanan <i>bottom-up</i> di luar kerangka formal ASEAN.</p>
10.	<p>Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara (2021)</p>	<p>Dwi Astuti Nurhayati, Ambari</p>	<p>Teori Peran (Role Theory), Kepentingan Nasional</p>	<p>Kualitatif (Studi Pustaka)</p>	<p>Menganalisis peran dan tindakan yang diambil Indonesia dalam menanggulangi kabut asap di Asia Tenggara, menyoroti upaya</p>

					diplomati k dan domestik.
--	--	--	--	--	---------------------------------

Penelitian pertama yang berjudul *The politics of environmental policy: haze pollution, ASEAN, and the way forward* yang di tulis oleh Putra Bama Andika. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika politik internal ASEAN yang menghambat penyelesaian isu kabut asap. Dengan menggunakan studi eksplanatoris empiris, (Putra, 2024) menyoroti bagaimana 'permainan saling menyalahkan' (*blame game*) yang terus-menerus terjadi antar negara anggota telah melumpuhkan efektivitas tata kelola regional. Temuan utamanya adalah bahwa kegagalan ASEAN dalam menengahi konflik politik ini secara langsung menciptakan kekosongan (*vacuum*) kepemimpinan dan akuntabilitas. Kekosongan inilah yang kemudian membuka ruang strategis bagi aktor-aktor non-negara, seperti NGO lingkungan (termasuk WALHI), untuk mengambil peran advokasi yang lebih vokal dan menuntut pertanggungjawaban di luar mekanisme ASEAN yang lumpuh.

Penelitian kedua yang berjudul *Environmental agreement under the non-interference principle: the case of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* di tulis oleh Fikri Muhammad. Jurnal ini secara spesifik mengkritik dasar filosofis dari *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Melalui studi kasus dan analisis kebijakan (Muhammad, 2022) berargumen bahwa prinsip fundamental non-interference (non-intervensi), yang merupakan inti dari ASEAN Way, adalah penghalang utama yang membuat AATHP tidak memiliki kekuatan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa prinsip non-intervensi secara konseptual bertentangan dengan penciptaan kewajiban yang keras (*hard obligations*) dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga. Akibatnya, perjanjian ini gagal menjadi alat yang kredibel untuk memaksa negara

anggota (seperti Indonesia) mematuhi komitmennya, yang relevan dengan konsep *Sharing Sovereignty* yang lemah.

Penelitian ke tiga Strategi Greenpeace Indonesia Dalam Advokasi Permasalahan Polusi Kabut Asap Di Sumatera Selatan yang di tulis oleh Andrian Sani. Penelitian ini memberikan studi kasus yang relevan mengenai strategi advokasi NGO transnasional lainnya, yaitu Greenpeace, dalam menangani kabut asap di Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka teori *Transnational Advocacy Networks* (TANs), penelitian (Sani et al., 2025) mengidentifikasi taktik-taktik kunci yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa Greenpeace secara efektif menerapkan *information politics* dengan menyebarkan data hotspot secara kredibel untuk membentuk wacana publik, serta *leverage politics* dengan menargetkan dan menekan korporasi yang terlibat untuk memaksa perubahan kebijakan, baik dari sisi pasar maupun pemerintah.

Penelitian ke empat yang berjudul *Implications of Citizen lawsuits for Forest and Land Fires in Central Kalimantan Province from the Perspective of Environmental* yang di tulis oleh Lilik Nurhidayah, Umi Laksmie, & I Gede Yudi. Jurnal ini menawarkan analisis yuridis mendalam tentang salah satu strategi advokasi kunci masyarakat sipil, yaitu *citizen lawsuit* (gugatan warga negara). Dengan fokus pada kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (Ary Setiawan et al., 2023) menganalisis bagaimana mekanisme gugatan ini digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas dasar keadilan lingkungan. Temuan utamanya adalah keberhasilan gugatan ini dalam membuktikan secara hukum adanya kelalaian (negligence) yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan yurisprudensi dan validasi empiris terhadap efektivitas strategi advokasi berbasis litigasi, yang juga merupakan taktik utama WALHI.

Penelitian ke lima yang berjudul *Corporate Accountability in Environmental Crimes: Lessons from Indonesia's Forest Fires and Beyond* yang ditulis oleh Sujono & Istianingsih. Jurnal ini berfokus pada aspek akuntabilitas korporasi

(corporate accountability) dalam kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan di Indonesia. Melalui studi kasus yang menganalisis putusan-putusan pengadilan, (Sujono & Istianingsih, n.d.) mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi seringkali tidak memadai dan tidak proporsional dengan skala kejahatan lingkungan yang dilakukan, sehingga gagal memberikan efek jera. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kegagalan penegakan hukum domestik inilah yang mendorong perlunya tekanan eksternal dari aktor transnasional untuk menuntut akuntabilitas korporasi.

Penelitian ke enam *Transboundary Haze in Indonesian and Malaysian News Media: Corpus-Assisted Ecolinguistics* yang di tulis oleh Suhandano, M. R. Nababan, & Riyadi Santosa. Penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan menganalisis bagaimana isu kabut asap dibingkai (framing) secara berbeda oleh media di negara-negara yang terdampak. Menggunakan metode analisis korpus berbasis linguistik, (Suhandano et al., 2025a) membandingkan pemberitaan di media Indonesia dan Malaysia. Temuan kunci menunjukkan adanya perbedaan narasi yang signifikan: media Indonesia cenderung membingkai kabut asap sebagai 'bencana' (fokus pada lokasi dan mitigasi), sementara media Malaysia lebih fokus membingkainya sebagai 'isu kesehatan dan polusi' (fokus pada dampak). Perbedaan framing ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas strategi *information politics* yang harus dimainkan oleh TANs seperti WALHI dalam menyatukan narasi di tingkat regional.

Penelitian ke tujuh yang berjudul *The Role of Indonesia in Managing Trans-Boundary Haze Pollution as Environmental Security Issue in Southeast Asia* yang di tulis oleh Lili Yulyadi Arnakim & Nadhira Shabrina. Jurnal ini mengkaji peran Indonesia dalam tata kelola kabut asap regional melalui kacamata keamanan lingkungan (environmental security). Dengan menggunakan analisis kualitatif data primer dan sekunder, penelitian (Arnakim & Shabrina, n.d.) mengevaluasi tindakan dan kebijakan Indonesia. Temuan utamanya sangat kritis, menyimpulkan bahwa sikap Indonesia dalam menangani polusi lintas batas cenderung 'pasif dan

acuh tak acuh' (passive and indifferent). Sikap pasif ini menunjukkan adanya kegagalan Indonesia dalam mengelola kedaulatan interdependensinya (*interdependence sovereignty*), sekaligus menjustifikasi perlunya intervensi atau tekanan dari aktor non-negara untuk mendorong tindakan yang lebih proaktif.

Penelitian ke delapan Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau yang di tulis oleh H. W. Arif. Jurnal ini secara langsung mengkaji aktor utama dalam penelitian Anda, yaitu WALHI, namun dengan fokus spesifik pada arena politik lingkungan di Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Wahyudi et al., 2021) menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan dan strategi yang digunakan WALHI dalam merespons kasus kabut asap yang kronis di provinsi tersebut. Penelitian ini memetakan bagaimana WALHI beroperasi di tingkat lokal, menggunakan berbagai taktik mulai dari advokasi kebijakan hingga litigasi (gugatan hukum) untuk menantang pemerintah daerah dan korporasi. Ini sangat relevan untuk memahami dimensi multi-level advocacy (advokasi multi-level) yang dijalankan oleh WALHI.

Penelitian ke Sembilan Emergent geographies of chronic air pollution governance in Southeast Asia: *Transboundary publics* in Singapore yang di tulis oleh Helena Varkkey. Penelitian ini menggeser fokus dari advokasi NGO terorganisir ke peran 'publik lintas batas' (*transboundary publics*), dengan mengambil studi kasus di Singapura. Melalui analisis wacana kualitatif, (Varkkey, 2022) berargumen bahwa masyarakat umum di Singapura, yang terdampak kabut asap kronis, telah membentuk geografi tata kelola baru secara informal. Mereka menciptakan wacana tandingan dan menerapkan tekanan *bottom-up* (dari bawah ke atas) secara langsung kepada pemerintah mereka sendiri dan korporasi. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya mekanisme advokasi transnasional informal yang beroperasi di luar kerangka formal ASEAN dan jaringan NGO.

Penelitian ke sepuluh Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara yang di tulis oleh D. A. Nurhayati & A. Ambari. Jurnal ini menganalisis peran Indonesia dari perspektif kebijakan negara,

berfokus pada tindakan-tindakan yang telah diambil Indonesia untuk menanggulangi kabut asap di tingkat regional. Menggunakan metode studi pustaka kualitatif, (Astuti Nurhayati, 2021) mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai upaya Indonesia, baik di arena diplomatik ASEAN maupun dalam bentuk kebijakan domestik. Penelitian ini memberikan gambaran *state-centric* (berpusat pada negara) mengenai upaya penanggulangan kabut asap, yang dapat menjadi pembanding kontras terhadap pendekatan *society-centric* (berpusat pada masyarakat) yang digunakan dalam penelitian Anda yang berfokus pada WALHI.

Berbagai penelitian yang sudah di jelaskan di atas telah mengkaji isu kabut asap dari perspektif tata kelola regional dan kegagalan negara, yang secara konsisten menyoroti kelemahan fundamental dari mekanisme formal ASEAN. Studi oleh (Muhammad, 2022) , misalnya, mengkritik AATHP yang dinilai tidak kredibel karena terhambat oleh prinsip non-interference . Kegagalan kelembagaan ini diperburuk oleh dinamika politik internal, di mana (Putra, 2024) menyoroti adanya permainan saling menyalahkan (*blame game*) yang melumpuhkan tata kelola regional dan secara langsung menciptakan kekosongan akuntabilitas . Dalam konteks Indonesia, sikap yang cenderung pasif dan acuh tak acuh dalam menangani isu lintas batas ini juga telah teridentifikasi, yang menunjukkan kegagalan dalam mengelola kedaulatan interdependensi (*interdependence sovereignty*). Sebagian besar penelitian lain, seperti kajian (Astuti Nurhayati, 2021), masih berfokus pada pendekatan *state-centric* (berpusat pada negara).

Penelitian yang lain nya menunjukan kelemahan di tingkat regional yang diperparah oleh kegagalan penegakan hukum di tingkat domestik. Studi oleh (Sujono & Istianingsih, n.d.) mengungkap bahwa akuntabilitas korporasi (*corporate accountability*) dalam kejahatan lingkungan masih sangat lemah . Penelitian tersebut menemukan adanya kesenjangan penegakan hukum di mana hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi pembakar lahan seringkali tidak memadai dan gagal memberikan efek jera. Meskipun strategi advokasi litigasi seperti *citizen lawsuit* telah terbukti berhasil secara yuridis dalam membuktikan

kelalaian pemerintah (Ary Setiawan et al., 2023) , kegagalan sistemik dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi ini memperkuat argumen tentang perlunya tekanan eksternal dari aktor non-negara.

Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada aktor non-negara juga telah berkembang, namun cenderung parsial dan terfragmentasi. Beberapa studi mengkaji aktor-aktor selain WALHI, misalnya penelitian (Sani et al., 2025) yang menganalisis strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) oleh Greenpeace, yang fokus pada information dan *leverage politics* untuk menekan korporasi di Sumatera Selatan . Studi lain oleh (Varkkey, 2022) menggeser fokus dari NGO terorganisir ke peran 'publik lintas batas' (*transboundary publics*) di Singapura, yang membangun tekanan *bottom-up* secara informal di luar kerangka ASEAN .

Studi yang secara spesifik meneliti WALHI juga telah dilakukan, namun dengan batasan yang jelas. Penelitian (Wahyudi et al., 2021) , misalnya, telah memetakan keterlibatan WALHI dalam politik lingkungan, namun fokusnya terbatas pada arena politik di tingkat lokal, yakni Riau. Dari tinjauan ini, sesuai yang telah di tulis pada latar belakang terdapat celah penelitian terkait penelitian terdahulu yang sudah dibahas menunjukkan adanya keterkaitan dengan penggunaan konsep *Transnational Advocacy Networks* secara multi level untuk kasus isu kabut asap yang di tambah dengan konsep *Sharing Sovereignty* yang menghubungkan tuntutan lokal di Indonesia dengan tekanan publik di Malaysia dan Singapura khususnya dalam merespons krisis kabut asap.